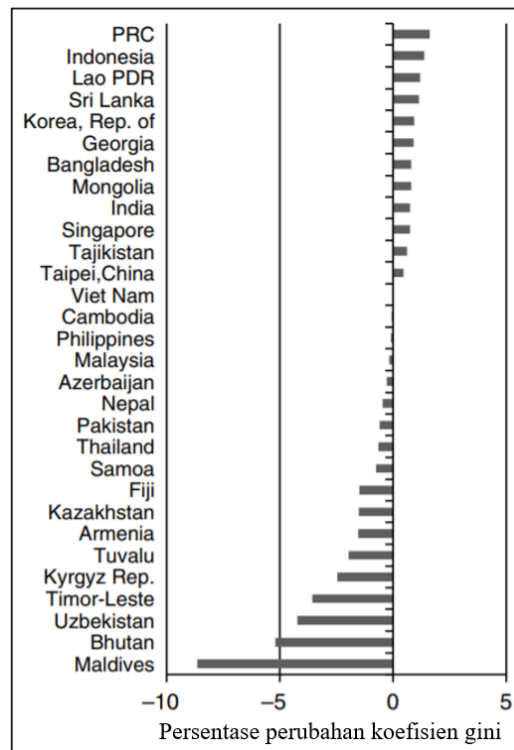


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

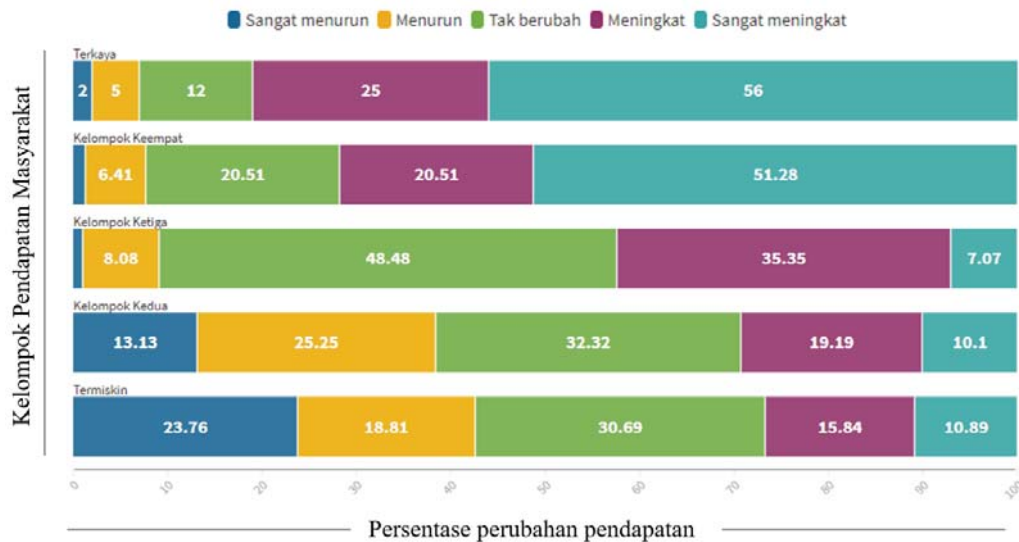
Ketimpangan pendapatan di Indonesia berada pada peringkat tertinggi kedua di antara negara-negara berkembang di Asia pada tahun 2014 (Zhuang dkk., 2014). Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia mencatat PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2010 senilai Rp6,86 ribu triliun pada 2010 dan menjadi Rp10,95 ribu triliun pada 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,3% per tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin sejahtera secara ekonomi. Namun kesejahteraan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat Indonesia secara merata.



Gambar 1.1
Perubahan Koefisien Gini di Negara Berkembang Asia
Tahun 1990-2000 (%)

Sumber: Zhuang dkk., 2014

Bank Dunia menemukan bahwa meningkatnya ketimpangan pendapatan di Indonesia bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi orang miskin, tetapi disebabkan oleh akumulasi kekayaan yang cepat oleh orang kaya. Selama tahun 2003 hingga 2010, konsumsi per orang dari 10 persen orang terkaya di Indonesia tumbuh lebih dari enam persen per tahun setelah disesuaikan dengan inflasi, sedangkan untuk 40 persen termiskin hanya tumbuh kurang dari dua persen per tahun (World Bank, 2015).



Gambar 1.2
Persentase Perubahan Tingkat Pendapatan pada Tahun 2010-2014

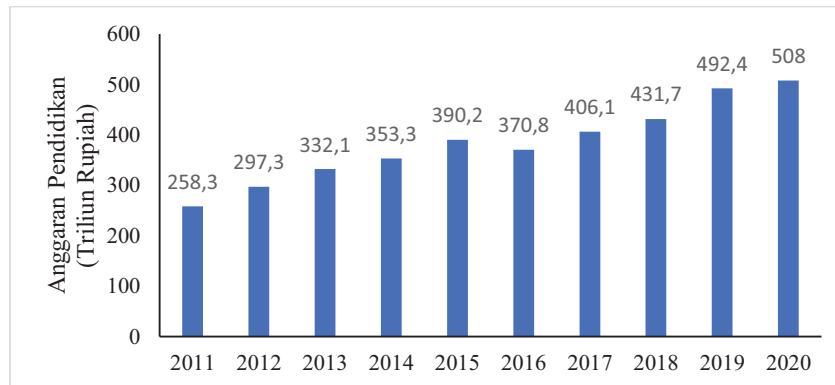
Sumber: World Bank, 2015

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan paling banyak terjadi pada kelompok terkaya dan kelompok keempat, sedangkan penurunan pendapatan paling banyak terjadi pada kelompok termiskin dan kelompok kedua. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa akumulasi kekayaan yang cepat oleh kelompok dengan pendapatan tinggi masih berlangsung hingga tahun 2014. Perubahan tingkat pendapatan dalam lima tahun terakhir di Indonesia pada kelompok termiskin dan kelompok kedua hanya mengalami sedikit peningkatan, yaitu dengan total peningkatan sebesar 26,73% dan 29,29%. Jika dibandingkan dengan total peningkatan pada kelompok keempat (71,8%) dan kelompok terkaya

(81%), jumlah tersebut tergolong sangat rendah. Sedangkan pada kelompok ketiga, dapat dilihat bahwa hampir setengah dari kelompok tersebut (48,48%) tidak mengalami perubahan tingkat pendapatan selama lima tahun terakhir. Perubahan tingkat pendapatan pada kelompok termiskin dengan label sangat meningkat hanya sebesar 10,89%. Di sisi lain, kondisi pendapatan yang sangat menurun dialami oleh 23,76% dari kelompok termiskin, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah penurunan pendapatan dengan label sangat menurun yang terbesar dari kelima kelompok tersebut.

Beberapa studi menemukan bahwa pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. De Gregorio dan Lee (2002) menemukan pentingnya faktor pendidikan dalam membuat distribusi pendapatan lebih setara. Selain itu, pendidikan terbukti dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dari dua sisi, yaitu dengan mengurangi pangsa pendapatan penghasilan teratas dan meningkatkan pangsa pendapatan penghasilan bawah (Abdullah dkk., 2015). Pendidikan lebih banyak meningkatkan tingkat pendapatan teratas sehingga pengaruh pendidikan akan semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya distribusi pendapatan (Wahyuni dan Monika, 2017).

Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Secara spesifik, alokasi anggaran pendidikan diatur pada pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yang isinya, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya peraturan tersebut maka anggaran pendidikan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan yang terjadi pada APBN dan APBD.



Gambar 1.3
Anggaran Pendidikan Indonesia 2011-2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Berdasarkan data tersebut, anggaran pendidikan periode 2011 hingga 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 9,09 persen per tahun. Selama periode tersebut, penurunan anggaran pendidikan hanya terjadi satu kali pada periode 2016, yaitu sebesar 4,97 persen dari periode sebelumnya.

Di Indonesia, penelitian mengenai hubungan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan sudah cukup banyak dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh dalam mengurangi tingkat ketimpangan (Hindun dkk., 2019; Nadya dan Syafri, 2019; Wahyuni dan Monika, 2017). Disisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh pada ketimpangan pendapatan (Anshari dkk., 2019; Fithrian dkk., 2015). Penelitian Anshari dkk. (2019), Nadya dan Syafri (2019), Wahyuni dan Monika (2017) menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai pengukuran pendidikan; Hindun dkk. (2019) menggunakan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan formal pada tingkat SMA untuk mengukur pendidikan; kemudian Fithrian dkk. (2015) menggunakan persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan minimal SD sebagai indikator pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut (Anshari dkk., 2019; Fithrian dkk., 2015; Hindun dkk., 2019; Nadya dan Syafri, 2019; Wahyuni dan Monika, 2017) belum ada yang menggunakan partisipasi pendidikan sebagai indikator dari ukuran pendidikan. Oleh karena itu,

dengan menggunakan data tahun 2015-2019, penelitian ini akan menganalisis pengaruh partisipasi pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai hubungan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Anshari dkk. (2019), Fithrian dkk. (2015), Hindun dkk. (2019), Nadya dan Syafri (2019), serta Wahyuni dan Monika (2017). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum ada yang mengukur pendidikan menggunakan seluruh tingkatan pada partisipasi pendidikan. Penelitian Anshari dkk. (2019), Nadya dan Syafri (2019), Wahyuni dan Monika (2017) menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai pengukuran pendidikan; Hindun dkk. (2019) menggunakan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan formal pada tingkat SMA untuk mengukur pendidikan; kemudian Fithrian dkk. (2015) menggunakan persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan minimal SD sebagai indikator pendidikan.

Studi mengenai pengaruh partisipasi pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada beberapa negara islam telah dilakukan oleh Shahabadi dkk. (2018). Dengan menggunakan angka partisipasi pendidikan pada tingkat primer, sekunder, dan universitas, penelitian Shahabadi dkk., (2018) menemukan bahwa angka partisipasi di sekolah dasar dan menengah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, dan angka partisipasi di universitas dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, dengan mengadaptasi penelitian yang dilakukan Shahabadi dkk. (2018) untuk diterapkan di Indonesia, penelitian ini akan menggunakan Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD, SMP, dan SMA sebagai indikator untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang dikumpulkan selama tujuh periode yaitu tahun 2015-2019 pada tingkat provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi menggunakan data panel. Terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam pengujian data panel, yaitu model *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Ringkasan temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di level provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2019. Hasil tersebut juga terbukti tidak sensitif terhadap perubahan periode penelitian di Indonesia bagian timur.
2. Hipotesis Kuznets yang diukur dengan menggunakan PDRB per kapita dan ketimpangan pendapatan ditemukan berlaku di Indonesia. Namun, hasil tersebut sensitif terhadap perbedaan wilayah dan perubahan periode penelitian. Ketika dilakukan perubahan periode penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa Kuznets tidak berlaku di Indonesia.
3. Pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD dan SMA tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di level provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2019. Namun, hasil tersebut sensitif terhadap perbedaan wilayah dan perubahan periode penelitian. Ketika membedakan wilayah penelitian, pengaruh partisipasi pendidikan pada tingkat SMA terhadap ketimpangan pendapatan ditemukan di Indonesia bagian timur. Sedangkan, ketika penelitian dilakukan pada periode 2011-2019, partisipasi pendidikan pada tingkat SD ditemukan di seluruh provinsi Indonesia dan Indonesia bagian timur.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini mencoba memenuhi kesenjangan penelitian terkait pengaruh pendidikan pada ketimpangan pendapatan di Indonesia yang sebelumnya hanya mengukur pendidikan melalui rata-rata lama sekolah, persentase penduduk yang

menyelesaikan pendidikan minimal SD, dan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan formal tingkat SMA. Dengan menggunakan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA, penelitian ini dapat mengetahui pengaruh dari setiap jenjang pendidikan. Sehingga dapat diambil kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.7 Uji Ketahanan (*Robustness*)

Robustness test atau uji ketahanan dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi akan berubah atau tetap stabil di bawah kondisi yang berbeda-beda. *Robustness test* atau uji ketahanan pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan dua kali perubahan periode penelitian. Dimana pada model estimasi utama periode penelitian menggunakan data tahun 2015-2019. Namun pada pengujian ketahanan (*Robustness*), penelitian ini akan menggunakan periode tahun 2020-2021 dan 2011-2021. Periode 2020-2021 dipilih untuk melihat apakah hasil penelitian ini sensitif terhadap terjadinya Covid-19. Uji ketahanan berikutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan periode 2011-2021. Perubahan periode penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah dengan periode yang lebih panjang akan merubah hasil penelitian serta bukti berlakunya hipotesis Kuznets di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, kesenjangan, tujuan, ringkasan metode yang digunakan, ringkasan hasil, serta kontribusi penelitian. Pada bab ini juga memaparkan uji ketahanan (*robustness*) dan sistematika penulisan yang digunakan oleh penelitian ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang terdiri dari teori ketimpangan pendapatan, pendidikan dan ketimpangan pendapatan, serta hipotesis Kuznets. Selain itu, bab ini juga mengemukakan penelitian-penelitian terdahulu beserta hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini mengulas pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, model empiris, deskripsi operasional variabel, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari variabel-variabel yang digunakan, memaparkan deskripsi statistik dari data yang digunakan, menjelaskan hasil temuan penelitian serta hasil dari uji ketahanan (*robustness*).

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan ringkasan hasil penelitian, simpulan, serta saran yang diperoleh berdasarkan temuan penelitian yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**